

MERAJUT TALI PERSATUAN DALAM KEBERAGAMAN

Oleh Sunarso

**) Disampaikan dalam Sarasehan BPPM Provinsi DIY yang bertema: Dengan Semangat Hari Ibu, Kita Tingkatkan Perhargaan dan Toleransi Terhadap Keberagaman Bangsa. Selasa, 15 November 2011.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Kemajemukan ini ditandai dengan banyaknya suku bangsa budaya, bahasa daerah, agama, serta berbagai kemajemukan lainnya. Hal inilah yang sering menimbulkan terjadinya konflik di antara suku bangsa, maupun penganut agama yang beragam itu, di dalam memenuhi kepentingan mereka yang berbeda-beda.

Sebagai negara multikultur, Indonesia merupakan masyarakat paling pluralistik di dunia. Memiliki sedikitnya 250 kelompok suku dengan 250-an lebih bahasa lokal. Negara besar ini terdiri lebih dari 17.000 pulau, 33 provinsi, 500 lebih kabupaten dan kota, 7000 lebih kecamatan, serta 60.000 lebih desa. Berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara nomor empat berpenduduk terbesar di dunia. Negeri ini memiliki tiga zona waktu, waktu Indonesia barat, tengah, dan timur. Jarak antara wilayah paling barat dan timur, Sabang dan Merauke sama dengan jarak Teheran dan Paris atau sama dengan jarak Jeddah dan London. Indonesia juga memiliki sekurang-kurangnya 6 agama besar: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Dari setiap suku, dalam batas-batas tertentu juga setiap agama, masing-masing memiliki varian sendiri-sendiri.

B. Karakteristik Masyarakat Indonesia

Uraian di atas menjelaskan, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan berbagai ciri-cirinya. Pluralisme tersebut kiranya penting untuk diungkapkan dalam rangka merajut tali persatuan dalam keberagaman, karena dengan mengungkapkan karakteristik masyarakat pluralis, akan didapati

gambaran faktor-faktor dan unsur-unsur yang perlu dipadukan dalam rangka integrasi nasional.

Beberapa karakteristik sebagai sifat dasar dari masyarakat majemuk, antara lain: (1) Terjadinya segmentasi kelompok-kelompok, yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lainnya; (2) Memiliki struktur sosial; (3) Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; (4) Secara relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; dan (6) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain (Nasikun, 1989: 36).

Kondisi masyarakat semacam ini, jelas membutuhkan perekat integrasi yang tidak sederhana, karena sangat berkaitan dengan berbagai hal. Masyarakat tersebut dapat terintegrasi di atas kesepakatan sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental. Dalam kondisi semacam ini kesepakatan terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental sangat penting karena mampu meredam kemungkinan berkembangnya konflik-konflik ideologi akibat dari kebencian atau antipati terhadap nilai-nilai kelompok lain (Usman, 1994: 4).

C. Keberagaman itu Potensi

Multikulturalisme, baik yang terbangun karena keragaman suku maupun agama, jika dikelola secara proporsional sebenarnya bisa dijadikan modal bagi terciptanya persatuan dan kemajuan bangsa. Bagaimana caranya, sampai saat ini belum ada pilihan selain melalui pendekatan politik yang demokratis. Pendekatan politik ini harus dilakukan oleh negara sebagai institusi demokrasi yang dianggap sah.

Nilai-nilai demokrasi perlu dikedepankan seperti dikemukakan oleh Henry B. Mayo. Dalam sistem politik yang demokratis, kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil rakyat yang dipilih secara berkala atas dasar kesamaan dan kebebasan politik. Nilai-nilai demokratis itu antara lain: (1) Menyelesaikan perselisihan secara damai; (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai;

(3) Mengadakan pergantian pemimpin secara teratur; (3) Membatasi kekerasan sampai minimum; dan (4) Menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat.

Kemauan politik dari pemerintah yang tengah berkuasa merupakan hal yang sangat menentukan. Beberapa hal bisa diupayakan oleh negara:

1. Sebagai institusi tertinggi, melalui tangan pemerintah, negara berhak dan wajib memperhatikan pluralitas suku, agama, dan keyakinan warga.
2. Perlakuan dan kebijakan negara atas pluralitas suku dan agama harus demokratis. Di era Orde Baru misalnya jumlah agama yang resmi hanya lima, mereka yang memeluk agama lain (Konghuchu) atau kepercayaan lain diwajibkan mencantumkan salah satu agama resmi itu.
3. Negara tidak boleh menolerir perbuatan kelompok yang dilakukan atas nama suku atau agama, namun membahayakan anggota masyarakat.

Setiap warga bangsa senantiasa harus dengan sadar mengolah kelebihan dan keunggulan dari kemajemukan masyarakat, sehingga kesatuan bangsa berada dalam keanekaragaman, dan persatuan kita dalam perbedaan. Oleh karena itu, dibutuhkan keikutsertaan semua komponen masyarakat untuk membangun Indonesia.

Pada hakekatnya, negara dituntut peduli untuk menciptakan iklim politik yang kondusif bagi pluralisme dan mencegah prasangka-prasangka kultural dan teologis yang mengakibatkan gesekan-gesekan dan kekerasan-kekerasan fisik, intelektual, maupun psikologis antarsuku atau antarpenganut agama dan spiritualisme. Hanya dengan iklim politik yang kondusif bagi pluralisme, kohesivitas masyarakat akan terbangun secara sehat, tanpa pemaksaan kehendak.

D. Empat Pilar Indonesia

1. **Pancasila.** Indonesia memerlukan *common platform* yang dapat menyatukan segala macam perbedaan yang ada, dan semua itu ada dalam Pancasila.
2. **UUD 1945.** Sebagai hukum dasar negara sangat berpengaruh dalam mengatur hubungan antar sesama warga negara, maupun antara warga negara dengan negara. Di dalam UUD 1945 semuanya telah diatur dengan jelas.

3. **NKRI.** NKRI adalah rumah kita semua, rumah bagi semua warga negara Indonesia. Keutuhan, kedamaian, dan keadilan di rumah Indonesia ini adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk terus menjaganya.
4. **Bhinneka Tunggal Ika.** Keberagaman di Indonesia adalah sebuah fakta, yang tidak mungkin diingkari, dan tidak boleh dipaksa untuk diseragamkan. Tugas kita semua adalah, mewujudkan perdamaian, persaudaraan, dan kerjasama di atas perbedaan tersebut. Keragaman bukanlah musibah namun sebuah anugerah. Adalah kewajiban kita bersama untuk mewujudkan persatuan di atas keragaman.

E. Internalisasi Nilai-nilai Multikultural

Menelusuri akar konflik di Indonesia sejak pertengahan abad ke-20 hingga penghujung awal milenium abad-21, secara umum berlatar belakang perbedaan kultur. Hal ini meliputi, benturan antar nilai, perbedaan sudut pandang dan persepsi yang dibedakan oleh masing-masing nilai masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada penentu lain. Cara bersikap yang tak dimengerti suatu etnis tertentu terhadap etnis lainnya ternyata dapat menyinggung perasaan dan berakhir pada pertumpahan darah. Begitu pula rasa saling curiga dan muncul rasa takut dan tidak aman serta penghinaan atas keyakinan warga terhadap warga lainnya. Beberapa upaya untuk merajut tali persatuan dalam keberagaman, perlu dilakukan untuk menciptakan kedamaian di negara majemuk ini.

1. Perlu internalisasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Berbagai upaya seperti workshop, seminar, pelatihan dan program pendidikan multikultural perlu dilakukan.
2. Diperlukan kesediaan dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi “proyek kemanusiaan” untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat yang toleran dan inklusif.
3. Berbagai elemen masyarakat termasuk LSM, organisasi kemasyarakatan, keagamaan harus ikut merumuskan nilai-nilai multikultural. Dengan skala prioritas mengidentifikasi masalah dari berbagai etnis dan agama, serta mencoba menemukan berbagai strategi untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan tersebut.

4. Partai politik hendaknya tidak hanya mencari kekuasaan saja, akan tetapi ikut dalam proyek kemanusiaan melalui karya nyata. Misalnya dengan memasukkan materi-materi yang bermuatan nilai-nilai multikultural dan *local wisdom* agar para kader dan simpatisan peka terhadap nilai-nilai multikultural.
5. Hendaknya para pemuka agama menginformasikan pada umatnya perihal ayat-ayat suci yang berkaitan dengan etika universal. Ayat-ayat yang memuat inklusifitas dan toleransi, agar tercipta suasana damai.
6. Dibutuhkan gerakan bersama untuk mengusung multikulturalisme di berbagai forum.

Semua itu dalam rangka mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan, menuju masyarakat multikultural. Ini perlu dilakukan dalam rangka mengembalikan lagi sifat-sifat toleran, inklusif, saling menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada, yang dulu pernah hilang dan hampir tercerabut akar-akarnya dari kesantunan yang dimiliki oleh bangsa ini.

F. Kondisi Pendidikan di Indonesia

Dari sisi pemikiran:

1. Pendidikan di Indonesia lebih banyak mencangkok dan meminjam teori-teori dari luar, terutama Barat.
2. Pendidikan lebih dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang sifatnya keduniawian, mementingkan kesuksesan hidup secara material, bukan pengembangan sisi kemanusiaan secara utuh..
3. Pendidikan difokuskan pada upaya mencetak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam masyarakat industri.
4. Idealnya pendidikan harus mengembangkan jasmani, rohani; makhluk individu, makhluk sosial; makhluk otonom, makhluk Tuhan. Mengembangkan IQ, EQ dan SQ. Mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang.
5. Pendidikan harus dapat mencetak manusia yang baik (*being good*) dan manusia cerdas (*being smart*).

Dari sisi praktik:

1. Pendidikan bergeser dari institusi yang meluhurkan manusia menjadi lembaga yang mencari laba.
2. Pendidikan bergeser dari wahana transformasi, menjadi proses transaksi.
3. Suasana belajar kurang menunjukkan keceriaan dan kebahagiaan anak.
4. Suasana takut berlangsung di sekolah. Anak takut kepada guru, guru takut kepada kepala sekolah, kepala sekolah takut pada pengawas, pengawas takut pada kepala dinas dst.
5. Kompetisi lebih diutamakan daripada kolaborasi (kerjasama).
6. Komunikasi sekolah dengan orang tua siswa kurang terjalin dengan baik.
7. Pembelajaran terkotak-kotak, tidak terpadu. Pendidikan moral seolah hanya tugas guru agama dan PKn saja.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus dilakukan melalui tiga lingkungan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. menurut para ahli, keluarga selalu berpengaruh besar terhadap perkembangan anak manusia. Keluarga sangat berperan dalam memberikan dasar pendidikan agama, pendidikan sikap, dan budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, serta menanamkan kebiasaan.

G. Pentutup

Dengan menggunakan teori konflik untuk memahami masyarakat majemuk seperti Indonesia, maka diharapkan dapat menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu masyarakat multi etnik, meskipun disadari bahwa setiap teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi memiliki kekurangan. Setiap kelompok etnis dalam masyarakat majemuk mempunyai potensi untuk melakukan integrasi maupun konflik, sehingga perlu adanya manajemen konflik yang dapat merekayasa agar masyarakat semakin terintegrasi.

Menurut teori konflik, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Pembangunan nasional selama ini belum mengedepankan nilai-nilai keadilan, kelompok masyarakat kelas bawah semakin termarginalisasi, dan semakin terpuruk dan mudah sekali dihasut untuk melakukan kerusuhan.

2. Persaingan antar elit lokal dan kelompok masyarakat dalam memperebutkan sumber daya alam, ekonomi, sosial dan politik, budaya telah menimbulkan benturan. Kelompok masyarakat yang tersisih, berusaha mengaktifkan lagi simbol-simbol agama, etnisitas untuk memenangkan kembali akses tersebut.
3. Perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri menyebabkan terjadinya pergeseran pranata sosial, nilai-nilai lama ditinggalkan namun nilai-nilai baru belum mengakar, sehingga keterasingan ini akan mengaktifkan lagi simbol-simbol lama.
4. Untuk mengatasi konflik nasional diperlukan acuan kerangka budaya nasional yang dapat diterima oleh seluruh etnis dalam masyarakat majemuk dengan mengedepankan nilai-nilai demokratis, rasa keadilan, dan kebebasan mengembangkan budaya.
5. Dalam mengatasi konflik dan membangun Indonesi Baru diperlukan penyelesaian akar permasalahan konflik, baik masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, hubungan pusat dan daerah oleh setiap elemen bangsa. Setiap elemen bangsa juga harus mengembangkan keunggulan masyarakat majemuk dalam koridor negara kesatuan RI.

H. Daftar Pustaka

- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Nazaruddin. (1989). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Usman, Sunyoto. (1994). "Integrasi dan Ketahanan Nasional". *Makalah* dalam Seminar Nasional Sumbangan Ilmu-ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional Pascasarjana UGM.
- Veeger, K.J. (1985). *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosologi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Weiner Myron, dkk. 1988. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

MERAJUT TALI PERSATUAN DALAM KEBERAGAMAN

*Oleh Sunarso
Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial UNY*

Disampaikan dalam Sarasehan BPPM Provinsi DIY yang Bertema:
Dengan Semangat Hari Ibu, Kita Tingkatkan Perhargaan dan Toleransi
Terhadap Keberagaman Bangsa
Selasa, 15 November 2011
Balai Khunti, Gedung Mandala Bhakti Wanitatama

**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT (BPPM)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2011**

